

Neoliberalisme: Sebuah Konsep Pemerintahan Publik Swasta

HUSNUL ISA HARAHAAP

Program Studi Ilmu Politik, FISIP USU
Jalan Prof. A. Sofian No. 1, Kampus USU, Medan 20155
Email: husnul.harahap@usu.ac.id

ABSTRAK

Studi ini membahas konsep neoliberalisme yang sebenarnya berkembang dari kondisi sosial dan politik di Amerika. Adapun yang menjadi fokus utama dalam studi ini adalah persoalan relasi antara neoliberalisme, liberalisme, kapitalisme dan konsep negara kesejahteraan serta demokrasi. Neoliberalisme memang tumbuh dan berkembang di dalam negara demokrasi. Akan tetapi neoliberalisme juga tidak terpisahkan dengan keberadaan negara-negara non-demokrasi. Studi ini melihat versi asli neoliberalisme pada dasarnya merupakan bentuk pemerintahan publik swasta versi Amerika, yang dalam perkembangannya kemudian mendapat tuduhan telah mempengaruhi (jika tidak ingin disebut mengganggu) tatanan ekonomi politik dunia yang kompleks, konsep negara kesejahteraan ataupun pembangunan, bahkan demokrasi.

Kata kunci: neoliberalisme, ekonomi politik, pemerintahan publik swasta, pembangunan, demokrasi

ABSTRACT

This study discusses the concept of neoliberalism which actually proceed from social and political conditions in America. The main focus in this study is the issue of the bearing between neoliberalism, liberalism, capitalism and the concepts of the welfare state and democracy. Neoliberalism indeed grows in democratic countries, but (latter-day) neoliberalism is also often considered inseparable from non-democratic countries. This study argues that the original version of neoliberalism was essentially an American version of private public government, which is then often accused of influencing the complex atmosphere of the world's political economy. It also influences the concept of a welfare state or development, even democracy.

Keywords: neoliberalism, political economy, public private government, development, democracy

PENDAHULUAN

Ada anggapan bahwa neoliberalisme adalah proyek politik yang dirancang untuk memulihkan ataupun membentuk kekuasaan kelas (internasional yang samar-samar) (Larner 2006). Ia juga dipahami sebagai doktrin ekonomi politik (*economic and a political doctrine*) (Vázquez-Arroyo 2008) yang muncul sebagai dampak dari hubungan yang kompleks antara perkembangan liberalisme, kapitalisme dan demokrasi.

Masalahnya, bila neoliberalisme dianggap bagian dari proyek politik untuk menciptakan kekuasaan kelas pada level internasional, maka pertanyaannya apakah lantas akan mengganggu tatanan ekonomi politik dunia yang kompleks, konsep negara kesejahteraan ataupun pembangunan, bahkan demokrasi. Jawaban terbaik atas masalah ini selalu tidak akan tunggal. Meskipun ada banyak faktor penyebab masalah ekonomi politik dunia, pembangunan dan kesejahteraan serta masalah demokrasi, seringkali neoliberalisme

dianggap sebagai penyumbang masalah utama. Bagaimana argumentasi neoliberalisme atas tuduhan-tuduhan tersebut?

Studi ini akan membahas konsep neoliberalisme sebagai suatu konsep yang seringkali dipersalahkan. Bagian ini tidak terlepas dari persoalan neoliberalisme yang kadang kala dianggap sebagai penyebab kegagalan dalam menciptakan pembangunan dan kesejahteraan, bahkan pada negara yang sebenarnya tidak memiliki karakter sebagai negara yang demokratis. Apakah memang perdebatan tentang neoliberalisme itu sendiri mempertegas akar masalah dari kegagalan tersebut, atau merupakan suatu cara mengubah sudut pandang dari persoalan yang sebenarnya.

METODE PENELITIAN

Studi ini akan menjelaskan secara singkat latar belakang dari neoliberalisme. Selanjutnya memaparkan bagaimana keterkaitannya dengan konsep liberalisme, kapitalisme dan konsep negara kesejahteraan, serta dampaknya bagi demokrasi. Apa jawaban neoliberalisme atas tuduhan-tuduhan yang disampaikan? Uraian pada bagian-bagian tersebut didasarkan pada penjelasan yang diperoleh dari penelusuran literatur ataupun bahan bacaan yang tersedia (*online* dan cetak).

LATAR BELAKANG NEOLIBERALISME

Penjelasan tentang neoliberalisme tidak terpisahkan dari liberalisme. Liberalisme adalah sebuah ideologi yang dalam bidang ekonomi menghasilkan kapitalisme. Pada awal penerapannya liberalisme berhasil menciptakan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, kurang lebih setelah satu abad kemudian, liberalisme mengalami masalah. Masalah yang paling besar adalah liberalisme (kapitalisme) mengalami kegagalan pasar (selain itu pengangguran). Keadaan ini menyebabkan adanya perubahan peran negara untuk menyelamatkan liberalisme-kapitalisme. Jika pada awalnya peran negara sangat minimal, ketika krisis terjadi peran negara dibolehkan dengan tetap terbatas (Ebenstein 1960).

Ternyata pemberian peran negara yang masih terbatas dianggap kurang mampu mengatasi krisis ekonomi. Pada tahun 1930-an konsep baru digunakan untuk memulihkan kepercayaan publik/individu terhadap demokrasi dan kapitalisme. Peran negara kemudian diperluas dengan kesejahteraan kepada individu (Harvey 2005, 183). *New deal* merupakan program yang memelopori penyelamatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan kapitalis serta yang paling penting menyelamatkan demokrasi-kapitalisme. Dengan kata lain, depresi ekonomi akhirnya gagal mendorong politik Amerika ke spektrum politik kiri (seperti totaliter Uni Soviet) atau kanan (seperti nasionalis/totaliter kanan-Jerman, Italia, China) (Keller 1999, 662). Politik *new deal* (Flanagan 1999) menjadikan program tersebut menjadi mungkin untuk dilakukan.

ANTITESIS NEGARA KESEJAHTERAAN

New deal pada prinsipnya merupakan program yang dikritik karena bertentangan dengan konsep negara minimal. Ini memberikan kesan bahwa kebijakan menuju ke arah konsep negara kesejahteraan banyak ditentang (Ebenstein 1960). Komplain bahkan bermunculan atas program ini yang dianggap telah mengubah karakter negara menjadi tidak minimal yaitu ditandai dengan adanya peningkatan anggaran layanan atau bantuan publik. Salah satunya dengan mengatakan bahwa negara mirip *Santa Claus*, "*We are all beginning to look to Uncle Sam to be Santa Claus*" (Patterson 1967, 70). Namun demikian, karena pada saat kapitalisme sedang dalam keadaan "sakit", maka program ini tetap diimplementasikan untuk menghadapi masalah ekonomi dan sosial serta untuk memulihkan keadaan saat itu.

Setelah keadaan mulai membaik, kapitalisme bangkit kembali. Ekonomi tumbuh, pendapatan dan keuntungan meningkat.

Masalah muncul ketika kapitalisme tumbuh pesat. Kapitalisme kesulitan mengembangkan keuntungan karena terdapat proteksi pasar dimana-mana (di berbagai negara). Perkembangan selanjutnya adalah terjadinya krisis kapitalisme ditahun 1970-an. Pertama, keuntungan kapitalis yang terus mengalami masalah. Kedua, masalah kendali ekonomi (Bockman 2013, 15) sebagai konsekuensi peran negara menciptakan kesejahteraan (yang terjadi di berbagai negara di dunia). Pada sisi lain krisis juga terjadi di berbagai negara di dunia “krisis minyak, krisis fiskal, stagflasi, krisis utang, dan krisis legitimasi” (Bockman 2013, 14). Kapitalisme kemudian bangkit dalam sebuah konsep baru neoliberalisme.

Amerika Serikat pada masa Presiden Ronald Reagan (1981- 1989) dan Inggris pada masa Perdana Menteri Margaret Thatcher (1979-1990) merealisasikan kebijakan “neoliberalisme” di negara mereka sendiri (Bockman 2013, 15). Kemudian, kebijakan ini diperluas, dengan prinsip pasar bebas bagi seluruh negara-negara di dunia.

VISI KESEJAHTERAAN NEOLIBERALISME

Menurut Johanna Bockman (Bockman 2013, 14) asumsi dari neoliberalisme adalah bahwa perusahaan swasta dan pasar bebaslah yang akan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Neoliberalisme tidak setuju dengan peran negara dalam menciptakan kesejahteraan. Sistem ini dianggap “kurang tepat” karena pemerintah tidak dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi atau memberikan kesejahteraan sosial. Dampak peran atau campur tangan pemerintah dalam masalah ini akan menciptakan kemunduran ekonomi yang berdampak pada ketidaksejahteraan sosial.

Johanna Bockman (Bockman 2013, 15) menuliskan bahwa “*Recently, the term “neoliberal” has been extended to a wide range*” (Bockman 2013, 15) (meliputi korporatisasi universitas, pergeseran kebijakan kesejahteraan ke arah filantropi dan kewirausahaan, meluasnya “pengawasan intensif”, privatisasi perusahaan-perusahaan negara, perluasan sektor-sektor rendah -pekerjaan pelayanan upah, pertumbuhan penahanan massal, dan sebagainya) bahkan budaya. Semua ini berkaitan dengan transformasi kapitalisme global (Bockman 2013, 15).

Neoliberalisme juga sering berfungsi sebagai indeks tatanan politik-ekonomi global (Ganti 2014). Untuk mendukung konsep neoliberalisme ini, semua harus terintegrasi dalam pasar bebas. Menurut Bockman (Bockman 2013, 15), krisis utang telah menjadi momentum untuk mendukung percepatan neoliberalisme di berbagai negara di dunia. Lembaga donor seperti IMF (Dana Moneter Internasional) adalah instrumen untuk “memaksa” negara berkembang mengadopsi “kebijakan penyesuaian struktural” berdasarkan Konsensus Washington sebagai syarat pinjaman baru dalam rangka menyelamatkan ekonomi. Konsesus ini melibatkan Bank Dunia, IMF, dan Departemen Keuangan AS (Saad-Filho 2005). Atau dengan kata lain “neoliberalisme telah membentuk kebijakan di tingkat internasional, nasional, dan lokal” (Bockman 2013, 14).

DAMPAK BAGI DEMOKRASI

Neoliberalisme adalah konsep baru ekonomi yang mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial dan politik (Saad-Filho and Johnston 2005). Konsep ini merupakan respons liberalisme atas negara kesejahteraan yang menghambat perkembangan kapitalisme yang tumbuh pesat dan membutuhkan perluasan pasar ke seluruh dunia. Namun konsep ini sering dikritik karena memiliki kelemahan, terutama karena dianggap sangat bias kepentingan terutama kepentingan negara ekonomi besar itu sendiri.

Pada sisi kebijakan muncul bias kebijakan publik yang dianggap pro pasar (Ekayanta 2022) (Soesilowati 2009) di negara-negara ekonomi kecil. Selain itu menimbulkan kesenjangan sosial dan dianggap menimbulkan masalah pembangunan, seperti di Amerika Latin (Abidin 2013). Paradoksnya, pasar bebas diterapkan, namun pengusaha di negara ekonomi kecil mengalami kesulitan untuk bersaing (Yuniarto 2014) karena kompetisi ekonomi terjadi antara kekuatan ekonomi besar dan ekonomi kecil. Perang dagang menjadi paradoks lain dari neoliberalisme (Oramah and Dzene 2019).

Pada sisi politik, demokrasi telah terkena dampak neoliberalisme (Williams 2021). Menurut Gonzalez neoliberalisme menciptakan demokrasi utopia. Utopia yang dimaksud adalah “utopia demokrasi global, plural, dan transparan” (Casanova 1996, 46). Karena dalam era neoliberalisme, negara demokrasi justru mendapat tekanan dari jaringan ketergantungan internasional (struktur transnasional) yang sudah terbentuk. Kekuatan ini dapat melakukan apa saja (hegemoni), sehingga masyarakat sipil menjadi sangat lemah untuk berperan dalam demokrasi. Pada kenyataannya problem yang muncul sebenarnya lebih kompleks. Meskipun, ada juga yang menjelaskan (Ekayanta 2021) bahwa agenda neoliberal dalam beberapa kasus sering mengalami kegagalan.

Argumentasi neoliberal terhadap pandangan kritis tentang neoliberal adalah dengan menjelaskan capaian positif yang telah muncul. Neoliberalisme melihat ada banyak sekali manfaat yang sudah dihasilkan dari perdagangan global. Masalah kemiskinan (dimana jutaan orang berhasil diselamatkan) termasuk salah satunya. Capaian positif lain, seperti transfer teknologi (sebagai dampak penanaman modal asing), efisiensi dan berkurangnya beban fiskal pemerintah (dampak privatisasi), dan yang lebih penting capaian positif tersebut bisa terjadi pada saat masih ada agenda neoliberal yang belum terlaksana sesuai harapan (Ostry, Loungani, and Furceri 2016, 38). Argumentasi ini tentu menimbulkan perdebatan. Namun, juga menghasilkan sebuah formulasi tentang keseimbangan kebijakan yang dalam kalimat Joseph Stiglitz disebut “*combining markets with appropriate regulation*” (Ostry, Loungani, dan Furceri 2016, 41). Sementara itu, terkait dengan masalah demokrasi, selalu terdapat situasi yang kompleks yang disumbang oleh banyak faktor.

SIMPULAN

Neoliberalisme merupakan tahapan lebih lanjut dari kapitalisme di Amerika Serikat setelah negara ini berhasil melewati krisis ekonomi politik yang terjadi pada tahun 1930-an, melalui program *new deal*. Meskipun banyak dikritik, program (*new deal*) ini berhasil menyelamatkan kepercayaan publik atas demokrasi-kapitalisme, dan terutama sekali telah berhasil mengobati krisis kapitalisme (depresi ekonomi). Namun, berakhirnya krisis ekonomi, telah menimbulkan tantangan baru bagaimana agar tidak terjadi lagi depresi ekonomi, ditengah kebangkitan ekonomi/kapitalisme yang sudah pulih. Pilihan yang paling masuk akal menjaga keseimbangan pasar yang berkonsekuensi pada tuntutan perluasan pasar. Perluasan pasar hanya mungkin terjadi jika hambatan utamanya diatasi, yaitu masalah proteksi. Perspektif anti proteksi untuk perluasan pasar ini kemudian dikenal dengan istilah pasar bebas. Masalah pembangunan di berbagai negara yang muncul terkait dengan kebijakan ekonomi politik yang terikat dengan ekonomi politik global ini, menjadi isu penting mengapa pembangunan gagal dan berhasil. Hal ini berimbas pula terhadap demokrasi karena adanya tuntutan kebijakan struktural ekonomi politik global. Inilah yang menjadi perdebatan manakala semua masalah selalu dikaitkan dengan neoliberalisme atau sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Endriady Edy. 2013. "Pembangunan, Neoliberalisme dan Kesenjangan: Belajar dari Pengalaman Amerika Latin." *Jurnal Interdependence* 1(1): 37–45.
- Bockman, Johanna. 2013. "Neoliberalism." *Contexts* 12(3): 14–15.
- Casanova, Pablo González. 1996. "Globalism, Neoliberalism, And Democracy." *Social Justice* 23(1/2 (63-64)): 39–48.
- Ebenstein, William. 1960. *Great Political Thinkers*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Ekayanta, Fredick Broven. 2021. "Kesinambungan dan Perubahan dalam Diskursus Pembangunan Indonesia." *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 13(1): 1–14.
- . 2022. "Partai Buruh dan Kelas Pekerja di Indonesia." *Journal of Politics and Policy* 4(2): 39–46.
- Flanagan, Richard M. 1999. "Roosevelt, Mayors and the New Deal Regime: The Origins of Intergovernmental Lobbying and Administration." *Polity* 31(3): 415–50.
- Ganti, Tejaswini. 2014. "Neoliberalism." *Annual Review of Anthropology* 43: 89–104.
- Harvey, David. 2005. *A Brief History of Neoliberalism*. New York: Oxford University Press.
- Keller, Morton. 1999. "The New Deal: A New Look." *Polity* 31(4): 657–63.
- Larner, Wendy. 2006. ed. David Harvey. *Economic Geography* 82(4): 449–51.
- Oramah, Benedict, and Richman Dzene. 2019. "Globalisation and the Recent Trade Wars: Linkages and Lessons." *Global Policy* 10(3): 401–4.
- Ostry, Jonathan D., Prakash Loungani, and Davide Furceri. 2016. "Neoliberalism: Oversold?" *Finance & Development* 53(1): 38–41.
- Patterson, James T. 1967. "The New Deal and the States." *The American Historical Review* 73(1): 70–84.
- Saad-Filho, Alfredo. 2005. "From Washington to Post-Washington Consensus." In *Neoliberalism, A Critical Reader*, eds. Alfredo Saad-Filho and Deborah Johnston. Pluto Press, 113–19. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt18fs4hp.16> (October 4, 2021).
- Saad-Filho, Alfredo, and Deborah Johnston. 2005. "Introduction." In *Neoliberalism, A Critical Reader*, eds. Alfredo Saad-Filho and Deborah Johnston. Pluto Press, 1–6. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt18fs4hp.4> (October 4, 2021).
- Soesilowati, ETTY. 2009. "Neoliberalisme: Antara Mitos dan Harapan." *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan* 2(2): 126–34.
- Vázquez-Arroyo, Antonio Y. 2008. "Liberal Democracy and Neoliberalism: A Critical Juxtaposition." *New Political Science* 30(2): 127–59.